



Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government

Fathiyah¹, Iskandar Nasution², Bambang Niko Pasla³, Fahmi Rasid⁴

¹Universitas Batanghari Jambi, Indonesia

²Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

³Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

¹fathiyahzaky74@gmail.com

²iskandar_nasution@gmail.com

³b_niko_p@me.com

⁴fahmi_rasid@gmail.com

Abstract

Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the ratio of regional dependence and independence in measuring the financial capacity of the Jambi Provincial Government for the 2016 - 2020 Fiscal Year. **Background Problems:** How big is the ratio of the contribution of Regional Original Revenue (PAD) to transfer funds from the center in the Jambi Provincial Government APBD in funding development financing for 2016-2020? **Research Methods:** The research is quantitative using secondary data in the form of Regional Original Income and transfers funds from the Jambi Province Government Budget Realization Report for the 2016 - 2020 Fiscal Year. **Finding/Results:** Based on the results of the ratio analysis, the degree of financial dependence of the Jambi Provincial Government in the 2016 - 2020 fiscal year is classified as moderate, with an average overall ratio of 63.60%, meaning that the Jambi Provincial Government in carrying out development financing is still dependent on transfer funds from the center. Meanwhile, the degree of regional financial independence is also classified as moderate/participatory with an average overall ratio of 57.13% **Conclusion:** The contribution of regional Original Revenue in funding development financing cannot be fully relied upon and still relies on transfer funds from the center.

Keywords: Regional finance; Regional Original Revenue; Transfer funds and budget realization reports

Abstrak

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio ketergantungan dan kemandirian daerah dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Corresponding author's email: fathiyahzaky74@gmail.com

This is an open-access article distributed under the terms a CC By-SA 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Tahun Anggaran 2016 - 2020. **Latar belakang Masalah:** Seberapa besarkah rasio kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap dana transfer dari pusat pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendanai pembiayaan pembangunan tahun 2016-2020?. **Metode Penelitian:** Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. **Temuan/Hasil:** Berdasarkan hasil analisis rasio tersebut derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016 – 2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 63,60% artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13%. **Kesimpulan:** Kontribusi Pendapatan Asli daerah dalam mendanai pembiayaan pembangunan belum bisa sepenuhnya diandalkan dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Kata Kunci: Keuangan daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana transfer dan laporan realisasi anggaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), maka tugas pemerintah provinsi selanjutnya adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dilakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kemendagri. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan sebagai bahan untuk melaksanakan perubahan APBD pada tahun berjalan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai *leading* sektor yang

melakukan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar kedepannya pengelolaan dan pelaksanaan APBD menjadi lebih terencana, baik dan teratur. Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan anggaran masih belum optimal terutama sekali yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah, hal ini bisa terlihat dengan target dan realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Jambi terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat kecil serta masih banyak bergantung pada dana-dana transfer dari pusat, padahal penerimaan dari Pendapatan Asli daerah ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi..

Akibat dari belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah ini menyebabkan realisasi pendapatan asli daerah menjadi sangat kecil padahal

sebenarnya potensi itu ada dan cukup besar hanya saja belum tergali, akibatnya dana untuk pembiayaan pembangunan menjadi lebih kecil dan harus bergantung dengan pendapatan transfer dari pusat, ini artinya tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga masih sangat kecil. Disamping itu Pemerintah Provinsi Jambi juga belum mempunyai inovasi baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diluar dari pajak dan retribusi. Hal lain yang menyebabkan rendahnya realisasi ini diantaranya adalah adanya penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah yang ternyata belum juga optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar. Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang

dengan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

Penelitian tentang rasio ketergantungan dan kemandirian daerah pernah penulis lakukan dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi periode 2013 – 2014 dengan kesimpulan hasil penelitiannya adalah bahwa hampir semua kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dengan tingkat rasio kemandirian sangat rendah yaitu dibawah angka 10%. Penelitian yang sama lainnya juga dilakukan oleh Rico Putra dkk (2016) dengan lokasi Pemerintah Provinsi Jambi periode penelitian 2008 – 2014 dan menyimpulkan hasil penelitiannya adalah rasio ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi cukup besar terhadap dana transfer dengan nilai rasio kemandirian pada kategori sedang/Partisipatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kaunang dkk (2016), Ai Siti Farida dkk (2019) dan Prakoso dkk (2019) yang meneliti pada beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi yang berbeda di Indonesia dan semua hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana transfer

dari pusat sangat besar dengan tingkat rasio kemandirian pada kategori instruktif/sangat rendah

Merujuk pada uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lanjutan tentang kemampuan keuangan daerah dilihat dari ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer serta tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Provinsi Jambi pada Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran tahun 2016 - 2020 dengan menggunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah rasio ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 ?
2. Seberapa besarkah rasio kemandirian daerah Pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya rasio ketergantungan daerah terhadap

Pendapatan Transfer pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020.

2. Untuk mengetahui besarnya rasio kemandirian daerah pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020.

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah. (Renowijoyo, 2010)

Kuangan daerah yang tercermin dalam APBD Pemerintah provinsi Jambi sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. (Perda Pertanggungjawaban APBD, 2016 - 2020)

Sumber pendapatan Pemerintah Daerah relatif dapat terprediksi karena pendapatan tersebut diatur oleh undang-

undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak dan retribusi daerah. Bahkan pemerintah daerah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak dengan demikian dapat diperoleh pendapatan secara optimal. (Mahmudi, 2010)

Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan adanya desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan republik Indonesia. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Transfer pemerintah pusat

- a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil Sumber Daya Alam
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
 - e. Dana otonomi khusus
 - f. Dana penyesuaian
- #### 3. Transfer pemerintah provinsi
- a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Bagi hasil lainnya
- #### 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga kini baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan secara signifikan, tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan secara umum Penerimaan PAD mengalami peningkatan secara signifikan pada era otonomi.

Walaupun PAD mengalami peningkatan secara signifikan tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 75-94%, sementara PAD secara rata-rata nasional hanya memberikan kontribusi antara 6-15% dari pendapatan daerah (Mahmudi, 2010)

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut : (Mahmudi, 2013):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Tingkat Kemandirian keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. Data yang tersedia kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah.

HASIL dan PEMBAHASAN

Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Pendapatan Transfer pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. Untuk melihat tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Tingkat rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2016	2.159.679.608.454	3.394.795.872.563	63,62
2017	2.723.260.588.950	4.311.792.610.112	63,16
2018	2.754.346.967.999	4.412.464.565.281	62,42
2019	2.922.494.905.401	4.582.514.394.709	63,77
2020	2.862.888.575.956	4.400.624.372.119	65,06
Rata-Rata Rasio			63,60

Sumber: Rekapitulasi RLA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap dana transfer pada Tahun anggaran 2016 - 2020 dalam kategori sedang dengan rasio rata-rata sebesar 63,60%, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi/sedang yang artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pendanaan pembangunan pada lima tahun terakhir ini adalah sebesar 63,60% masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Rasio Kemandirian Daerah pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020

Untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Tingkat rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)
2016	1.233.514.664.109	2.159.679.608.454	57,12
2017	1.580.304.867.342	2.723.260.588.950	58,03
2018	1.656.569.597.282	2.754.346.967.999	60,14
2019	1.658.411.489.308	2.922.494.905.401	56,75
2020	1.535.183.487.238	2.862.888.575.956	53,62
Rata-Rata Rasio			57,13

Sumber: Rekapitulasi LRA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata derajat kemandirian Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016 - 2020 dalam kategori sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 57,13%, ini artinya kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai kegiatan pembangunan hanya sebesar 57,13%.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

1. Derajat ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016 – 2020 tergolong rendah yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 63,60%, artinya pada periode tersebut derajat ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 63,60% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

2. Derajat kemandirian pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 – 2020 dalam kategori sedang yaitu dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13% artinya pada periode tersebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai pembangunan daerah masih rendah yaitu hanya sebesar 57,13% pada periode Tahun 2016 - 2020.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat meningkatkan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pusat.
2. Ada upaya dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru disamping mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada, misalnya dengan membuat regulasi dan kebijakan dalam memungut penerimaan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baik dari pajak, retribusi ataupun PAD lainnya dan memutus rantai birokrasi yang dapat menghambat penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., Mayesti, I., & Nurdin, N. (2019). ANALISIS PENGARUH UMP, INFLASI, IPM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Development*, 7(1), 8-14.
- Erlinda, N. (2016). *Pembangunan wilayah berkelanjutan di Provinsi Jambi dan implikasi Model Jamrud* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Erlinda, N. (2016). Kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan di Provinsi Jambi melalui pendekatan Model FLAG. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 1-14.
- Fathiyah, & Bambang Niko Pasla. (2021). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior (OCB) in Jambi Province Government Employees. *Jurnal Prajaiswara*, 2(2), 127-136.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i2.24>
- Fathiyah, 2015, Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Periode Tahun Anggaran 2013 – 2014, Prosiding, Seminar Nasional Hasil penelitian 2014, LPPM Unbari
- Fathiyah, F., Sukmana, A., Majid, H., & Masnun, M. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117-122.
- Fathiyah, F. (2017). ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 80-86.
- Fathiyah, F. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(3), 41-45.
- Fathiyah, Abdi Sukma, & Bambang Niko Pasla. (2021). Analysis of the Accuracy Level of Revenue and the Distribution Mechanism of Tax Revenue Sharing and Non-Tax Revenue Sharing for the Jambi Province Government in 2015-2019. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 15-24.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.16>
- Farida, Ai Siti, R. Faisal Maulana Nugraha, 2019, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Subang, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol. II No. 2 Desember 2019, 107 – 129
- Kaunang, Cheris Enjelita, Amran T., Naukoko, dan Albert T. Londa, 2016, Analisis Kinerja Pengelolaan keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2010 – 2014, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No.2.

Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta

Mahmudi, 2013, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Prakoso, Jalu Aji, Fitra Sari Islami, Rr. Retnosugiharti, 2019, Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Jawa Tengah, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar Vol. 4 No. 1

Putra, Rico, dan Surya Hidayat, 2016, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 3 No.4

Renyowijoyo, Muindro, 2010, Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Pemerintah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang

Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 - 2020

Pemerintah Provinsi Jambi, Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi TA. 2016 - 2020

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta

Republik Indonesia, 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta